



Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi melalui Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Sukodono

Anggraeni Retno Pangestu¹, Akhmad Qomaru Zaman²

^{1,2}Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

anggerenipangestu@gmail.com, qomaru@unipasby.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 13, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted July 24, 2025

Keywords:

Value Cultivation, Anti-Corruption, PPKn Teacher, SMP Negeri 1 Sukodono

ABSTRACT

Instilling anti-corruption values is an important part of character education, especially through the subject of Pancasila and Citizenship Education (PPKn). This study aims to examine the role of PPKn teachers in instilling anti-corruption values in SMP Negeri 1 Sukodono. The research method is qualitative with a descriptive approach. Data collection is carried out through observation, interviews, and documentation processes. The results of the study show that PPKn teachers play an active role in teaching the importance of integrity, among other things by encouraging students to use school facilities wisely and not abuse resources. However, it was still found that the lack of understanding and training caused some of the teachers to not be able to deliver anti-corruption education optimally. In addition, anti-corruption education has been proven to be able to increase students' sense of responsibility in daily life. The suggestion given is that PPKn teachers receive special training to strengthen their competence in teaching anti-corruption values effectively.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 13, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted July 24, 2025

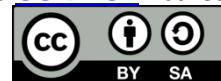
Kata Kunci:

Penanaman Nilai, Anti Korupsi, Guru PPKn, SMP Negeri 1 Sukodono

ABSTRAK

Penanaman nilai anti korupsi sebagai bagian penting dalam pendidikan karakter, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini bertujuan mengkaji peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di SMP Negeri 1 Sukodono. Metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn berperan aktif dalam mengajarkan pentingnya integritas, antara lain dengan mendorong peserta didik untuk menggunakan fasilitas sekolah secara bijak dan tidak menyalahgunakan sumber daya. Namun, masih ditemukan bahwa kurangnya pemahaman dan pelatihan menyebabkan beberapa dari guru yang belum mampu menyampaikan pendidikan anti korupsi secara optimal. Selain itu, pendidikan anti korupsi terbukti mampu meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang diberikan adalah agar guru PPKn mendapat pelatihan khusus guna memperkuat kompetensi dalam mengajarkan nilai-nilai anti korupsi secara efektif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Anggraeni Retno Pangestu

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

E-mail: anggerenipangestu@gmail.com



PENDAHULUAN

Korupsi sekarang ini telah menjadi masalah sosial yang mendalam di Indonesia. Tindak pidana ini berkembang pesat dan merambah ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, merusak tatanan secara sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi (Zaman dkk., 2024b). Sehingga dibutuhkan upaya efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengenalkan bahaya korupsi sejak dini, agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai integritas. Pendidikan, khususnya di tingkat sekolah, memegang peranan penting dalam upaya ini. Pengenalan dan penanaman nilai anti korupsi dalam dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi tindak pidana korupsi di masa depan (Suryani, 2013). Hal ini membantu membentuk peserta didik agar mampu menolak segala bentuk pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Pendidikan anti korupsi melibatkan pembentukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk korupsi dan dampaknya, serta perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Lebih dari itu, pendidikan ini yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang diperlukan untuk melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi adalah menciptakan generasi muda yang memiliki moralitas tinggi dan berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memfokuskan pada teori saja, tetapi juga pada penerapan praktis untuk membangun karakter yang tangguh terhadap godaan dari korupsi (Widyatama dkk., 2024). Pendidikan anti korupsi ini juga berfungsi membangun karakter teladan, yang penting agar anak-anak menghindari perilaku koruptif sejak dini. Pendidikan ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenali, menanggulangi, dan menangguk tindakan korupsi di masyarakat (Suryani dkk., 2025). Dalam kurikulum pendidikan anti korupsi, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus utama pembelajaran. Pertama, aspek kognitif yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, serta kemampuan untuk mengombinasikan ide-ide secara kreatif. Kedua, aspek afektif berkaitan dengan sikap dan apresiasi terhadap nilai-nilai yang diajarkan, serta adanya wujud kesadaran dalam menilai dan menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip anti korupsi. Ketiga, aspek psikomotorik berfokus pada pengembangan keterampilan dan kecakapan yang dibutuhkan, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam mengatasi tindakan korupsi.

Pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting karena dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal, memiliki seperangkat pengetahuan yang dapat memberikan pencerahan terhadap kesalahpahaman yang berkembang seputar upaya pemberantasan korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk mampu membentuk karakter peserta didik yang memiliki moralitas tinggi dan berperilaku anti koruptif. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mencegah dan melawan tindakan korupsi di lingkungan masyarakat secara luas. Pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menjadi alat untuk membangun karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki rasa integritas yang tinggi (Setiawan, 2025). Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah menjadi langkah yang cukup strategis untuk mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak dini.



Pendidikan anti korupsi tidak hanya relevan untuk peserta didik di tingkat pendidikan tinggi, tetapi juga sangat penting diterapkan pada pelajar tingkat SMP/ sederajat (Adiyono dkk., 2023). Pada usia ini, peserta didik masih dalam tahap pembentukan karakter dan memiliki potensi untuk diarahkan menuju sikap dan perilaku anti koruptif. Dengan memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi pada usia dini, diharapkan generasi muda lebih siap untuk menghadapi berbagai macam godaan yang merusak integritas mereka. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih terbatas, sehingga pendidikan anti korupsi sejak usia dini akan sangat membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar pentingnya menghindari perilaku koruptif. Berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul "Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi melalui Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Sukodono" yang bertujuan untuk mengkaji peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi, serta meningkatkan pemahaman guru dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi secara lebih optimal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi dan mencegah tindakan korupsi, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial secara holistik dan mendalam, dengan mengedepankan makna di balik suatu perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang terjadi. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2017). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji peran guru PPKn dalam menanamkan nilai anti korupsi di SMP Negeri 1 Sukodono. Penelitian ini difokuskan pada peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di SMP Negeri 1 Sukodono. Fokus utama yang terletak pada bagaimana cara proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang digunakan sebagai media untuk menanamkan nilai integritas dan anti korupsi kepada para peserta didik dalam usianya tersebut di dalam lingkungan kelas maupun di kehidupan sekolah secara umum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu sekolah untuk mampu mengamati aktivitas pembelajaran maupun non pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, serta budaya sekolah yang dirasa mampu mendukung pembentukan karakter anti korupsi di lingkup pendidikan. Wawancara yang digunakan bersifat tak berstruktur (*unstructured interview*), yang memungkinkan peneliti menggali informasi-informasi secara lebih fleksibel dan mendalam dari narasumber, khususnya para guru PPKn dan pihak yang terkait lainnya. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data tertulis seperti rencana pembelajaran, silabus, atau materi ajar yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan nilai anti korupsi.



Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu agar menghasilkan data yang komprehensif dan memperkuat validitas temuan.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017), yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dilakukan sesuai proses yang dilakukan sebelumnya. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman atas fenomena yang diteliti. Kesimpulan akhir diambil setelah melalui proses verifikasi yang berkelanjutan. Untuk menjamin keabsahan data, maka digunakannya teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai narasumber (guru, peserta didik, dan dokumen), sementara triangulasi metode dilakukan membandingkan hasil proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi di Lingkungan SMP Negeri 1 Sukodono

Guru memiliki peran penting dalam menanamkan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas (Mufida, 2024). Salah satu bentuk penanaman karakter tersebut melalui penguatan nilai-nilai kejujuran dan sportivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, guru PPKn ini tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa (Risky dkk., 2024). Peserta didik diajarkan untuk tidak menyontek saat ujian sebagai wujud integritas dalam belajar, tidak mengambil barang milik teman atau orang lain tanpa izin sebagai bentuk penghargaan terhadap hak orang lain, serta selalu berkata jujur dalam setiap situasi, baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selain itu, peserta didik juga didorong untuk menolak segala bentuk kecurangan dalam perlombaan atau kompetisi, termasuk sikap curang dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Melalui pendekatan ini, guru berusaha membentuk pola pikir dan kesadaran moral peserta didik agar mampu bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, pembentukan karakter peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh peran serta orang tua di rumah. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberikan teladan yang baik, terutama melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan (Zaman dkk., 2024b). Sikap jujur yang ditunjukkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi contoh konkret yang mudah ditiru oleh anak. Keteladanan orang tua juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan dan keberanian untuk menolak tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Sehingga kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi kunci dalam membentuk karakter para peserta didik secara utuh dan berkelanjutan. Pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi harus dilanjutkan dan diperkuat di lingkungan keluarga (Susilo & Ramadan, 2021).



Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa keberadaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Sukodono memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter peserta didik. Kantin ini memiliki fungsi edukatif, tidak hanya sebagai tempat jual beli makanan dan minuman, tetapi juga sebagai sarana dalam mewujudkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, serta kedisiplinan. Namun, pelaksanaan program kantin kejujuran ini sering kali masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masih belum tersusunnya sistem pengelolaan yang sistematis dan terarah. Saat ini, kantin kejujuran masih berjalan secara sederhana, dengan dua peserta didik bertugas setiap hari untuk menjaga dan mengawasi transaksi selama jam istirahat. Meskipun tugas ini memberikan pengalaman langsung dalam berlatih jujur, tetapi belum terdapat program khusus yang benar-benar terstruktur untuk mampu mengoptimalkan fungsi kantin sebagai sarana pembinaan karakter (Zaman dkk., 2024a).

Pembiasaan yang diterapkan di kantin kejujuran sejauh ini masih terbatas pada aspek kejujuran dalam bertransaksi, seperti membayar dengan uang pas atau mengambil kembalian sendiri. Padahal, kantin kejujuran memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan karakter peserta didik jika dikelola dengan pendekatan yang lebih terencana dan inovatif. Kantin kejujuran dapat menjadi media efektif dalam menanamkan berbagai nilai pendidikan anti korupsi, seperti rasa kejujuran, kepedulian sosial, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan (Zaman dkk., 2024a). Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi khusus dalam pengelolaan kantin kejujuran sendiri agar nantinya tujuan pembentukan karakter benar-benar tercapai. Strategi ini yang dapat mencakup pelatihan bagi pengurus OSIS, integrasi program kantin kejujuran dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta evaluasi berkala yang melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, kantin kejujuran yang tidak hanya menjadi sarana pembelajaran nilai, tetapi juga menjadi wahana nyata bagi peserta didik untuk mempraktikkan integritas dalam kehidupan sehari-hari (Triyanto & Nuryadi, 2020).

B. Faktor-faktor yang Menghambat Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Sukodono

Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui berbagai aktivitas pendidikan, baik secara formal dalam proses pembelajaran maupun nonformal dalam kegiatan sekolah lainnya. Salah satu karakter utama yang perlu ditanamkan sejak dini adalah sikap sportif dan kejujuran, yang merupakan bagian dari nilai-nilai utama dalam pendidikan antikorupsi. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, guru mendorong peserta didik untuk tidak menyontek saat ujian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan penghargaan terhadap proses belajar. Selain itu, guru juga mengajarkan pentingnya menjaga hak milik orang lain dengan tidak mengambil barang milik teman tanpa izin, serta membiasakan peserta didik untuk selalu berkata jujur dalam berbagai situasi, baik kepada guru maupun sesama teman. Guru juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan mengajak peserta didik menolak segala bentuk kecurangan, baik dalam perlombaan, tugas kelompok, maupun aktivitas organisasi peserta didik (Wulandari & Tejakusuma, 2023). Tidak kalah penting, peserta didik juga dibimbing untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan berani menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, seperti menyembunyikan kesalahan.



Hasil wawancara dengan Ibu Riza, seorang guru PPKn di SMP Negeri 1 Sukodono, mengungkapkan bahwa peran guru dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi tidak terbatas pada pengajaran di kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan sekolah seperti pengelolaan kantin kejujuran. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pengawas sekaligus pembina dalam jalannya kegiatan kantin tersebut. Kantin kejujuran di sekolah ini dikelola bersama oleh peserta didik, khususnya pengurus OSIS yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi transaksi selama jam istirahat. Setiap harinya, dua peserta didik mendapat tanggung jawab untuk bertugas di kantin. Melalui keterlibatan langsung ini, peserta didik mendapatkan pengalaman berharga dalam mempraktikkan kejujuran secara nyata. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, sistem pengelolaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Sukodono yang belum tersusun secara sistematis dan terarah. Saat ini, kantin tersebut lebih difungsikan sebagai tempat menjual makanan dan minuman biasa tanpa dilengkapi dengan program pembinaan khusus yang dapat melatih kejujuran peserta didik secara lebih terstruktur dan juga berkelanjutan.

Padahal, keberadaan kantin kejujuran di lingkungan sekolah memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peserta didik jika dikelola dengan strategi yang lebih terencana dan edukatif (Ningsih, 2022). Pembiasaan yang diterapkan sejauh ini masih terbatas pada kejujuran dalam hal bertransaksi, seperti membayar dengan uang pas dan tidak mengambil kembalian lebih. Jika hanya difungsikan begitu, maka nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan pun bersifat parsial dan belum menyentuh dimensi karakter menyeluruh. Kantin kejujuran seharusnya menjadi wahana strategis untuk menanamkan nilai-nilai lain, seperti rasa kepedulian terhadap sesama, kesederhanaan dalam hidup, kemandirian dalam bertindak, serta tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tugas. Sehingga penting bagi pihak sekolah merancang strategi khusus agar kantin kejujuran dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian integral dari program pendidikan karakter. Strategi mencakup pembuatan modul pelatihan untuk pengurus kantin, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, serta integrasi kegiatan kantin kejujuran ke dalam pelajaran PPKn atau kegiatan ekstrakurikuler. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antar warga sekolah, kantin kejujuran tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga media pembelajaran karakter yang kuat dan bermakna bagi peserta didik.

Dalam situasi sekarang, di mana tantangan globalisasi, krisis identitas, dan konflik sosial semakin kompleks, peran Pancasila sebagai identitas dan jiwa bangsa menjadi semakin vital (Hasan dkk., 2024). Pancasila berfungsi sebagai fondasi nilai yang dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk tetap teguh dalam prinsip dasarnya tanpa kehilangan keterbukaan terhadap kemajuan zaman. Pancasila menjadi penerang jalan bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik dalam maupun luar. Upaya menjaga, menginternalisasikan, dan mengamalkan Pancasila bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan sebuah kebutuhan moral dan kultural demi menjaga keutuhan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

C. Dampak Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi dengan Mata Pelajaran Lain SMP Negeri 1 Sukodono

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam berbagai mata pelajaran lain. Pendekatan ini bertujuan memperluas pemahaman peserta didik bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut masalah moral, sosial, dan ekonomi. Misalnya,



dalam pelajaran Matematika, guru dapat mengaitkan nilai-nilai anti korupsi dengan konsep dampak ekonomi yang timbul akibat korupsi, seperti ketimpangan distribusi pendapatan atau kerugian negara akibat penggelapan anggaran. Sementara itu, dalam mata pelajaran Sosiologi, peserta didik diajak menganalisis dampak sosial dari korupsi, termasuk hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pendekatan lintas mata pelajaran seperti ini, peserta didik akan memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai esensi dan bahaya korupsi. Mereka yang tidak hanya memahami korupsi sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa (Danil, 2021).

Pendekatan integratif ini juga memungkinkan peserta didik mengembangkan karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas secara lebih kontekstual. Materi pelajaran menjadi relevan dengan realitas kehidupan mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Semangat anti korupsi yang tertanam melalui berbagai mata pelajaran akan membentuk kesadaran kolektif yang kuat di kalangan peserta didik, mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih bersih, transparan, dan demokratis (Wibowo, 2013). Meski demikian, dalam praktiknya, guru PPKn sering kali menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih padatnya kurikulum yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk menyisipkan nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan lintas disiplin. Di samping itu, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep anti korupsi, sehingga koordinasi antar guru serta pelatihan lanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang disampaikan kepada peserta didik konsisten dan tepat sasaran.

Dari hasil wawancara dengan Pak Ferdi, seorang guru PPKn di SMP Negeri 1 Sukodono, diketahui bahwa upaya penanaman nilai anti korupsi di sekolah menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sikap peserta didik. Peserta didik mulai menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap dampak buruk korupsi bagi negara, dan mereka menjadi lebih kritis terhadap tindakan-tindakan yang mengandung unsur ketidakjujuran. Peserta didik juga menunjukkan keberanian dalam menolak serta melaporkan tindakan yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran yang telah diajarkan. Mereka menjunjung tinggi sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, terutama berkaitan dengan isu-isu korupsi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi bukan sekadar teori di kelas, melainkan menginternalisasi karakter positif dalam diri peserta didik. Peran guru PPKn menjadi semakin penting karena mereka berada di garis depan dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan peserta didik.

Untuk itu, guru perlu mengaitkan materi anti korupsi dengan isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat (Ilham, 2023), seperti membahas kasus korupsi yang sedang ramai dibicarakan di media massa atau mengaitkannya dengan kondisi sosial ekonomi di sekitar lingkungan peserta didik. Dengan membuat pembelajaran terasa lebih nyata dan dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari, peserta didik akan lebih mudah memahami pentingnya menolak tindakan korupsi dalam kehidupan. Selain itu, guru menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan melalui berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi peran (*role playing*), studi kasus, hingga pemanfaatan media digital (Putri dkk., 2024). Metode pembelajaran yang bervariasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik, tetapi juga memperkuat penghayatan mereka terhadap nilai-nilai anti korupsi. Guru PPKn juga perlu



menjalin kerja sama dengan guru mata pelajaran lain, kepala sekolah, serta komite sekolah dan peserta didik, guna menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar mendukung nilai-nilai anti korupsi. Kolaborasi ini sangat penting agar pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu mata pelajaran saja, melainkan menjadi budaya bersama yang diterapkan konsisten di seluruh lingkungan sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan sikap kritis terhadap korupsi akan tertanam kuat dalam diri peserta didik sebagai bekal mereka menjadi warga negara yang baik, berintegritas, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara di masa depan.

Guru PPKn di SMP Negeri 1 Sukodono memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui keteladanan sikap dan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, *role-playing*, studi kasus, serta kegiatan apersepsi membangun kesadaran moral peserta didik. Konsistensi dalam menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta ketegasan terhadap tindakan curang seperti menyontek atau manipulasi nilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter peserta didik. Guru diharapkan adil dan mendorong peserta didik untuk berani menolak serta melaporkan segala bentuk kecurangan, termasuk pungutan liar. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan, pemahaman yang terbatas, dan padatnya kurikulum membuat pengintegrasian nilai anti korupsi belum optimal. Pendidikan anti korupsi di sekolah ini bertujuan membentuk peserta didik yang berintegritas, beretika, dan sadar hukum. Peserta didik menjadi lebih jujur, berani menolak ketidakjujuran, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penanaman nilai ini tidak hanya menciptakan budaya sekolah yang kondusif dan demokratis, tetapi juga menjadi langkah preventif terhadap praktik korupsi di masa depan. Dengan dukungan guru sebagai *role model*, keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan sekolah, serta kolaborasi orang tua dan masyarakat melalui sosialisasi, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan generasi penerus yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui peran guru PPKn di SMP Negeri 1 Sukodono memberikan dampak positif dalam membentuk karakter peserta didik, terutama dalam hal kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kedisiplinan. Sebagai teladan, maka guru PPKn menunjukkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu akibat padatnya kurikulum dan minimnya pelatihan khusus mengenai metode pembelajaran anti korupsi. Oleh karena itu, disarankan agar penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan secara kolaboratif, dengan cara mengintegrasikannya dalam semua mata pelajaran, melibatkan pihak kepala sekolah dalam penyusunan kebijakan yang mendukung, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang jujur, bersih, dan transparan. Dukungan dari seluruh pihak ini penting agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Adiyono, A., Mardani, M., Fauzan, A., Mutaqiin, A. M., Ulhaq, A. D., Al-Baihaq, H. M., & Gunawan, I. (2023). Penyuluhan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMP untuk Membentuk Generasi Muda yang Integritas. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 97-108. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i3.365>
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82. <https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.770>
- Ilham, D. (2023). *Penguatan Nilai Anti Radikalisme dan Anti Korupsi dalam Pembelajaran di Satuan Pendidikan Dasar*. Cipta Media Nusantara.
- Mufida, S. (2024). Peran guru dalam pembentukan karakter siswa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.448>
- Ningsih, S. W. (2022). Analisis Pembentukan Nilai Karakter Jujur Siswa Sekolah Dasar melalui Kantin Kejujuran. *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)*, 5(5), 918-923. <https://doi.org/10.22460/collase.v5i5.12136>
- Putri, S., Siregar, P. D., Andini, A., Novia, N. Y., Hasibuan, S. M., & Yusnaldi, E. (2024). Membangun Kesadaran Sosial Melalui Pembelajaran IPS yang Interaktif. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1325-1334. <https://doi.org/10.51178/jsr.v5i3.2220>
- Risky, E. A., Widyatama, P. R., Syaifudin, M., & Sari, M. M. K. (2024). Pemanfaatan Platform Wordwall sebagai Sarana Pembelajaran dalam Mendorong Motivasi Belajar Pendidikan Pancasila Kelas IX SMPN 16 Surabaya. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1429-1439. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1121>
- Setiawan, A. (2025). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Bentuk Penguatan Karakter Siswa. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 3(2), 277-283. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i2.338>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2). <https://dx.doi.org/10.22441/visikom.v12i2.413>
- Suryani, P., Ginting, R., & Gaol, L. L. (2025). Character Building dan Anti-corruption Education: Mampukah Menciptakan Branding, Perilaku Anti Koruptif dan Good Personality Calon Akuntan Berintegritas? Character Building and Anti-Corruption Education: Can They Foster Branding, Anti-Corrupt Behavior, and a Good Personality in Future. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 8(2), 41-52. <https://doi.org/10.31629/axxwfg07>



- Susilo, F., & Ramadan, Z. H. (2021). Analisis Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1919-1929. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1950>
- Triyanto, T., & Nuryadi, M. H. (2020). Kantin Kejujuran sebagai Upaya Pembentuk Civic Disposition (Studi di SMP N 10 Surakarta). *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 15-37. <https://doi.org/10.2019/jppkn.v8i1.70>
- Wibowo, A. (2013). Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyatama, P. R., Zaman, A. Q., Listari, I. D., Nilakandi, T. N., Jatiningsih, O., Sari, M. M. K., & Santosa, B. (2024). Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi di Lingkungan Keluarga: Sosialisasi bagi Ibu-ibu Dharma Wanita untuk Membangun Generasi Berintegritas. *DEDICATE: Journal of Community Engagement in Education*, 3(02), 10-24. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/dedicate/article/view/36023>
- Wulandari, H., & Tejakusuma, L. P. (2023). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 30-50. <http://dx.doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9021>
- Zaman, A. Q., Irnawati, I., Islami, T. A., Nilakandi, T. N., Ainni, N., & Ramadhanti, R. W. (2024a). Strengthening the value of anti-corruption prevention in the environment of SMA Muhammadiyah 10 Surabaya in realizing a superior generation. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(4). <https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16483>
- Zaman, A. Q., Irnawati, I., Sari, M. M. K., Ainni, N., & Khitiah, M. (2024b). Keluarga Bersih dari Korupsi: Strategi Pendidikan dan Kesadaran Anti-Korupsi (PPM di LLDIKTI VII). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1034-1042. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4401>